

Mengubah â??Administrasiâ?• Menjadi â??Aksi Nyataâ?•: LPI Dorong Malut Manfaatkan Momen Supervisi KPK untuk Reformasi Total

Keterangan

default watermark

default watermark



Ketua LPI Maluku Ut
RAJAK IDR

Maluku Utara â?? Lembaga Pemantauan Integritas (LPI) menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi di Maluku Utara tidak boleh berhenti pada tataran prosedural. LPI mendorong Pemerintah Provinsi untuk menjadikan pencegahan sebagai â??denyut nadiâ?• utama birokrasi, mengingat celah tata kelola di daerah tersebut masih cukup lebar. Rabu (19/8/2026)

Bagi LPI, dua alat kerja KPKâ??MCP dan SPIâ??memiliki fungsi yang jauh lebih strategis dari sekadar rapor tahunan. Keduanya ibarat â??stetoskopâ?• yang mampu mendeteksi detak abnormal dalam sistem pemerintahan. Karena itu, LPI menekankan pentingnya menjadikan temuan di kedua instrumen tersebut sebagai dasar bedah kebijakan, bukan sekadar mengejar angka agar terlihat baik secara statistik.

Lebih lanjut, LPI menyoroti hadirnya tim koordinasi dan supervisi KPK sebagai â??momentum emasâ?• bagi Maluku Utara. LPI mengingatkan bahwa kedatangan tim supervisi bukanlah kunjungan seremonial, melainkan uji petik atas sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam memberantas kebocoran anggaran. Sinergi ini harus dioptimalkan untuk membenahi sistem yang berpotensi rentan, bukan dijalankan dengan pola â??basah-basahanâ?• administratif.

Menariknya, LPI memberikan perhatian khusus kepada Gubernur Sherly Tjoanda Laos. LPI meminta agar komitmen terhadap sistem merit tidak lagi sekadar menjadi narasi puitis dalam pidato. Tolak ukur keberhasilan, menurut LPI, harus terlihat dari bagaimana mekanisme seleksi dan promosi jabatan berjalan secara terbuka, terukur, dan mengutamakan kompetensi teknis serta catatan integritas.

LPI menegaskan bahwa sistem merit adalah â??pisau bedahâ?• yang dapat membedah budaya nepotisme. Jika pengisian jabatan masih didominasi oleh pendekatan personal dan kepentingan politik, maka jargon meritokrasi akan kehilangan makna. Namun, jika Gubernur mampu menunjukkan transparansi proses dan keberpihakan pada kualitas sumber daya manusia, maka publik akan melihat itu sebagai bukti nyata bahwa Maluku Utara serius berbenahâ??bukan sekadar mengganti slogan.

(Red)

Kategori

1. NASIONAL

Tanggal Dibuat

2026/08/19